

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**Jalan Jend. Sudirman No. Telp./Fax. (0742) 22021
Email.p3ap2kbbkabtanjabbarat@gmail.com
Kuala Tungkal**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan Kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 telah selesai disusun sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, maka disusunlah Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 mendatang dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Kuala Tungkal, 09 Mei 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. H. MUHAMMAD YUNUS
Pembina Utama Muda
NIP. 19680417 198810 1 001

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4 Review Terhadap RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
Bab III Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	24
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah	26
3.3 Program dan Kegiatan	29
Bab IV Rencana Kerja (RENJA) dan Pendanaan Perangkat Daerah	38
Bab V Penutup	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dan akselerasi pencapaian tujuan dan pembangunan yang telah dirumuskan bersama dan menjadi komitmen semua pihak, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, yang merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja (RENJA) perangkat daerah yang definitif, dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang sah dan harus dilaksanakan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang kemudian juga dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 dan berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mendasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor: 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana dan Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
14. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor: 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2026

1. Maksud :

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mendukung visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2021-2026.

2. Tujuan :

Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 untuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi serta tercapai sasaran pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan

3. Mensinkronkan serta mensinergikan program dan kegiatan Dinas dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang, landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Awal Rencana Kerja (RENJA), maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Berisi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026, Review terhadap RKPD, Penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, menyampaikan usulan program dan kegiatan Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026.

BAB IV RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi evaluasi capaian target kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis, menguraikan kegiatan-kegiatan yang targetnya belum tercapai dan pelayanan yang harus dilaksanakan pada Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026. Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) menyajikan pengukuran terhadap kinerja kegiatan dan target yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun sebelumnya. Dilakukannya evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) pada tahun sebelumnya, selain akan didapat persentase pencapaian kinerja dari target yang ditentukan, juga hambatan atau permasalahan yang mungkin timbul yang dialami dalam melaksanakan program dan kegiatan dan sejauh mana program dan kegiatan tersebut merupakan prioritas pencapaian kebutuhan yang diinginkan dalam masyarakat. Dengan adanya evaluasi tersebut maka program dan kegiatan yang akan direncanakan pada tahun berikutnya diharapkan menjadi lebih baik.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 melaksanakan 10 (Sepuluh) program 29 kegiatan dan 79 sub kegiatan, dengan sumber dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun dana yang dikelola untuk program pembangunan atau Belanja Operasi (Barang dan Jasa) Tahun 2025 yang bersumber dari APBD dan Dana DAK BOKB Fisik dan Non Fisik sebesar Rp. **19.813.130.985,-** realisasi anggaran sampai dengan triwulan I Tahun 2025 (keadaan bulan Maret) Tahun 2025 sebesar Rp. **1.548.802.318,- atau 7,82%.**

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) program dan kegiatan yang bersumber dari APBD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat disajikan dalam **Tabel TC.29** berikut:

FORMULIR E. 81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN IV TAHUN 2024

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi 2024		REALISASI KINERJA PADA 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Kerja PD Penanggung jawab	
				K	Satuan	RP	K	Rp	K	Rp	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	100%	%	38.849.066.650	100%	1.166.022.071	100%	7.829.910.465	25%	1.265.315.072	25%	514.015.605	25%	3.170.859.970	25%	2.554.539.562	100%	7.504.730.209	200%	8.670.752.280	200,00	22,32	Sekretariat Dinas P3AP2KB	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD	7	Laporan	25.441.248.208	1	Laporan	1	Laporan	-	731.667.193	-	383.018.094	-	2.046.633.767	1	1.142.054.525	1	Laporan	4.303.373.579	2	4.495.953.579	28,57	17,67	Sekretariat DP3AP2KB
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100	Persen	2.703.577.567	100	414.087.046	100	433.382.650	25	88.692.724	25	68.836.000	25	137.685.330	25	136.696.545	100	431.910.599	200	845.997.645	200,00	31,29	Sekretariat DP3AP2KB	
		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kartu inventaris barang milik daerah	5	Kartu inventaris	88.500.000	5	-	5	kartu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	100,00	-	Sekretariat DP3AP2KB	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kehadiran pegawai	100	Persen	399.850.000	100	32.000.000	100	persen	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Kartu	-	100	32.000.000	100,00	8,00	Sekretariat DP3AP2KB
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	48	unit	1.365.317.350	48	177.658.060	48	1.616.991.200	12	72.994.800	12	16.360.000	12	821.926.008	12	669.055.190	48	Unit	1.580.335.998	96	1.757.994.058	200,00	128,76	Sekretariat DP3AP2KB
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan PD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	74	Dokumen	711.286.525	14	dokumen	14	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	5	Dokumen	3	22.267.200	14	Dokumen	111.694.400	28	160.440.200	37,84	22,56	Sekretariat DP3AP2KB
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan OPD	182	Unit	6.146.702.000	33	104.327.000	33	879.135.000	10	310.000.000	0	Unit	5	Unit	18	516.475.000	33	Unit	851.717.000	66	956.044.000	36,26	15,55	Sekretariat DP3AP2KB
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	1.992.585.000	100	196.624.165	100	236.880.000	25	51.210.355	25	33.614.311	25	72.882.865	25	67.991.102	100	Persen	225.698.633	200	422.322.798	200,00	21,19	Sekretariat DP3AP2KB	
	Meningkatnya Implementasi Pengarus Utamaan Gender, peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEREMPUAN	Persentase OPD dan Desa melaksanakan PPRG	10%	%	3.798.292.100	10%	771.662.300	10%	595.639.200	2,5%	98.335.200	2,5%	72.415.000	2,5%	152.568.835	2,5%	182.871.000	10%	506.190.035	20%	1.277.852.335	200,00	33,64	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan PUG	90	Lembaga PUG	664.960.608	15	Lembaga PUG	15	Lembaga PUG	3	Lembaga PUG	4	Lembaga PUG	4	Lembaga PUG	4	Lembaga PUG	15	Lembaga PUG	36.485.000	30	102.020.000	33,33	15,34	Bid. Pemberdayaan Perempuan
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kab/Kota	Jumlah perempuan yang berperan/partisipasi dbidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	1400	Orang	2.877.897.642	200	orang	200	orang	50	orang	50	orang	50	orang	50	orang	200	orang	448.015.035	400	1.114.152.335	28,57	38,71	Bid. Pemberdayaan Perempuan
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	30	Lembaga Layanan PP	255.433.850	10	Lembaga Layanan PP	5	Lembaga Layanan PP	2	Lembaga Layanan PP	1	Lembaga Layanan PP	1	Lembaga Layanan PP	1	1.650.000	5	Lembaga Layanan PP	21.690.000	15	61.680.000	50,00	24,15	Bid. Pemberdayaan Perempuan
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan penanganan pengaduan kekerasan	100%	%	1.127.429.750	100%	107.558.000	100%	468.231.200	25%	6.300.000	25%	78.610.000	25%	57.702.251	25%	211.746.200	100%	354.358.451	200%	461.916.451	200,00	40,97	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah/ Kabupaten	Jumlah perempuan korban kekerasan	1	-	27.429.750	-	-	2	115.500.000	-	-	-	-	1	7.400.000	1	97.280.000	2	Kali	104.680.000	2	104.680.000	200,00	381,63	Bid. Pemberdayaan Perempuan
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban rujukan	1	Kasus	350.000.000	5	kasus	5	Kasus	1	6.300.000	2	78.610.000	1	37.323.900	1	49.885.000	5	Kasus	172.118.900	10	279.676.900	1000,00	79,91	Bid. Pemberdayaan Perempuan
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah unit layanan pengaduan kekerasan	129	Unit layanan	750.000.000	24	layanan	24	unit layanan	6	unit layanan	-	6	unit layanan	6	unit layanan	24	unit layanan	77.559.551	48	77.559.551	37,21	10,34	Bid. Pemberdayaan Perempuan	

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi 2024		REALISASI KINERJA PADA 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga	10%	%	650.000.000	2%	65.958.800	2%	64.636.000	0,5%	-	0,5%	-	0,5%	63.256.000	0,5%	-	2%	63.256.000	4%	129.214.800	40,00	19,88	Bid. Pemberdayaan Perempuan
		Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan Hak anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga melalui KG	1000	Keluarga	200.000.000	200	Keluarga	200	64.636.000	-	-	-	-	200	63.256.000	-	-	200	63.256.000	400	63.256.000	40,00	31,63	Bid. Pemberdayaan Perempuan
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Jumlah pusat layanan keluarga	25	Pusat layanan keluarga	450.000.000	5	Pusat Layanan Keluarga	5	65.958.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	65.958.800	20,00	14,66	Bid. Pemberdayaan Perempuan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD memiliki data pilah berdasarkan jenis kelamin	100%	%	360.000.000	100%	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	-	100,00	-	-	
		Pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota	Profile gender kabupaten tingkat jabung	5	profile gender	360.000.000	1	Profile Gender	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	20,00	-	-	Bid. Pemberdayaan Perempuan
Meningkatnya Implementasi Kabupaten Layak Anak		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Pemenuhan hak anak yang terpenuhi	54%	%	2.372.219.269	49%	412.632.900	49%	456.348.400	12,25%	9.000.000	12,25%	6.000.000	12,25%	237.611.600	12,25%	175.722.800	49%	428.334.400	98%	840.967.300	181,48	35,45	PPHA
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha yang dibina	75	Lembaga PHA	1.342.050.744	50	Lembaga PHA	65	164.889.600	15	9.000.000	15	6.000.000	15	89.889.600	20	44.250.000	65	149.139.600	115	541.642.400	153,33	40,36	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan penguatan dan pengembangan	100	Sekolah	1.030.168.525	20	Sekolah	20	291.458.800	-	-	-	-	10	147.722.000	10	131.472.800	20	279.194.800	40	299.324.900	40,00	29,06	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
		Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang memperoleh layanan perlindungan khusus	27,30%	%	2.090.000.000	25,50%	114.815.000	25,50%	506.557.000	6,375%	-	6,375%	51.561.800	6,375%	71.177.000	6,375%	288.883.180	25,50%	411.621.980	51,00%	526.436.980	186,81	25,19	Bidang Perlindungan dan
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	2	upaya pencegahan	730.000.000	8	upaya pencegahan	2	185.588.000	-	-	0,5 upaya pencegahan	46.308.000	0,5 upaya pencegahan	39.848.000	1 upaya pencegahan	86.177.000	2 upaya pencegahan	172.333.000	10	172.333.000	500,00	23,61	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan	30	Orang	340.000.000	35	Orang	30	215.869.000	-	-	10 Orang	5.253.800	10 Orang	3.979.000	10 Orang	130.620.180	30 Orang	139.852.980	65	139.852.980	216,67	41,13	Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	109	Unit layanan PA	1.020.000.000	15	Unit Layanan PA	17	105.100.000	-	-	-	-	-	5	27.350.000	12	72.086.000	17	99.436.000	32	214.251.000	29,36	21,01
Terkendalinya		Program Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,9		1.602.992.000	1,91	305.539.901	1,91	284.144.000	1,91	12.000.000	1,91	8.000.000	1,91	90.370.000	1,91	172.595.000	1,91	282.965.000	1,9	588.504.901	1,90	36,71	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan
			Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Grand Design Pengendalian Penduduk	100%	%		100%		100%		25%		25%		25%		25%		100%		100%		100		
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Perda/ Perbup) yang mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas dalam rangka Pengendalian Penduduk	19	Kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK	805.000.000	3	Kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK	3	39.934.000	-	-	-	-	-	-	3	109.921.000	3	109.921.000	6	149.855.000	31,58	18,62	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan
		Pemetaan Perkiraan Jumlah penduduk yang update tingkat kabupaten/ Kota	Jumlah profil kependudukan yang update tingkat kabupaten	19	Profil KKBPK	797.992.000	3	Profil KKBPK	3	174.144.000	-	12.000.000	1	8.000.000	1	90.370.000	1	62.674.000	3	173.044.000	6	438.649.901	31,58	54,97	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan

No	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi 2024		REALISASI KINERJA PADA 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2024)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggran Renstra PD s/d Tahun 2024 (%)		Unit Kerja PD Penanggung jawab
				K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
											K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5			6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
	Meningkatnya Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase tingkat ketidakterberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi (Drop Out KB)	19,58%	%	5.946.405.632	19,62%	2.495.161.200	19,62%	3.568.132.400	4,905%	76.500.000	4,905%	199.067.000	4,905%	953.058.500	4,905%	#####	19,62%	3.099.978.500	39,24%	5.595.139.700	200,41	94,09	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan
		Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Frekuensi pelaksanaan advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB	105	Kali	911.000.000	22 Kali	1.577.473.500	21 kali	2.008.837.000	5 kali	9.000.000	5 kali	154.067.000	5 kali	570.423.500	6 kali	1.181.267.000	21 kali	1.914.757.500	43	3.492.231.000	40,95	383,34	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/ PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan dalam penyuluhan dan pergerakan program KKBPK	100%	Persen	3.687.405.632	100%	290.984.800	100%	360.524.600	25%	63.000.000	25%	42.000.000	25%	84.000.000	25%	169.824.600	100%	358.824.600	100%	649.809.400	100,00	17,62	Bid. Pengendalian Penduduk, Penyuluhan & Penggerakan
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	100%	Persen	796.000.000	20%	300.764.400	100%	920.461.000	25%	4.500.000	25%	3.000.000	25%	231.135.000	25%	336.721.600	100%	575.356.600	120%	876.121.000	120,00	110,07	
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase ormas/mitra kerja yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	100%	Persen	552.000.000	100%	325.938.500	100%	278.309.800	-	-	-	-	25%	67.500.000	75%	183.539.800	100%	251.039.800	200%	576.978.300	200,00	104,53	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan anggota Poktan yang ber-KB (BKB, BKR, BKL, UPPKS)	100%	%	2.954.000.000	100%	1.927.789.000	100%	1.949.328.400	25%	9.000.000	25%	79.060.000	25%	863.175.500	25%	990.809.539	100%	1.942.045.039	200%	3.869.834.039	200,00	131,00	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) yang mendapatkan pembinaan KKS	100	Orang	2.954.000.000	21 Poktan	1.927.789.000	100 Orang	1.949.328.400	25 Orang	9.000.000	25 Orang	79.060.000	25 Orang	863.175.500	25 Orang	990.809.539	100 Orang	1.942.045.039	121	3.869.834.039	121,00	131,00	Bid. KB & Ketahanan Kesejahteraan Keluarga
				6,2088		59.750.405.401	6,0612	7.367.139.172		15.722.927.065		1.476.450.272		1.008.729.405		#####		6.448.520.281		#####	6,0612	21.960.618.786	1.510,60	439,26	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program																						97,62	36,75		
Prediksi Kinerja Program																									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :																									
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																									
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berikutnya :																									

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Adapun kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Adapun indikator kinerja pelayanan ada yang merupakan indikator kinerja utama dan ada yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK). Kinerja pelayanan yang dilaksanakan merupakan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja setiap tahunnya.

Di bawah ini disajikan tabel target kinerja dan pencapaian kinerja pelayanan Tahun 2024, sebagaimana tercakup pada **Tabel T.C. 30:**

TABEL T-C 30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
08	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
1	Indek Pembangunan Gender (IPG)			87,00	87,50	88,50	89	85,68	85,79	88,50	89	Realisasi Capaian Tahun 2022 s/d triw. III
2	Indek Pemberdayaan Gender (IDG)			68,50	69	69,50	70,00	68,31	73,2	69,50	70,00	
3	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD		40%	30%	35%	40%	40%	3%				
4	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO(per 100.000 penduduk perempuan)		9	15	12	9	6	11,72	2,42	9	6	
5	Angka Perceraian			1,5	1,25	1,0	0,75	1,3	1,26	1,0	0,75	
6	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten		0,026%	0,026%	0,026%	0,026%	0,026%	0,026%		0,026%	0,026%	
7	Skor Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)			599	645	699	745	599	599	699	745	Sudah memperoleh Status KLA Pratama
14	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana											
1	Angka Total Kelahiran/ (Total Fertility Rate/TFR) per WUS 15-49 tahun		2,45	2,55	2,50	2,45	2,40	2,59	2,37	2,45	2,40	Realisasi Capaian Tahun 2022 s/d triw. III
2	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)			69	68	67	66	69	34,85	67	66	
3	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)			58,2	58,20	62,44	64,56	66,34	58,2	62,44	64,56	
4	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan menikah usia 15-49 tahun		67,5	65,6	66,8	67,5	68,3	64,4	58,9	67,5	68,3	
5	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terpenuhi/Unmeet-Need)		20,05	27,05	25,05	20,05	18,05	9,19	16	20,05	18,05	

Adapun capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sebagaimana tersebut di atas sampai dengan kondisi Triwulan III Tahun 2024, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- I. Dalam mencapai sasaran kinerja meningkatnya kesetaraan gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang merupakan indikator kinerja utama. IPG dan IDG adalah tolok ukur untuk mengetahui capaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan atau menggambarkan kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan IDG adalah merupakan alat ukur untuk melihat sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Adapun capaian terhadap IPG dan IDG Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah penghitungan oleh BPS, dengan komponen IPG antara lain (1) Angka Harapan Hidup, (2) Angka Harapan Lama Sekolah, (3) Rata-rata Lama Sekolah dan (4) Pengeluaran Per-kapita. Dan Komponen IDG antara lain (1) Keterlibatan Perempuan di Parlemen, (2) Perempuan sebagai manajer, profesional, administrasi dan teknis serta (3) sumbangan perempuan dalam pendapatan. Tahun 2024 IPG ditargetkan sebesar 87,50 dan target IDG sebesar 85,79 maka pencapaian realisasi pada kondisi triwulan III Tahun 2024 realisasi/capaian IPG adalah 85,79, dan IDG di posisi 73,20. Penghitungan data IPG dan IDG adalah dikeluarkan oleh Kementerian PPPA.

Capaian realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan program pada kondisi triwulan IV Tahun 2024 dalam pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- I. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dengan kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
 - a. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu:

Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan output kegiatan, jumlah peserta pelatihan PUG target 15 orang dari Lembaga PUG dan Perangkat Daerah, pagu anggaran sebesar Rp. 59.450.870,- Dengan realisasi keuangan Rp. 35.095.870,- tingkat capaian keuangan 60,72 % dan fisik 60,72% yaitu pelatihan PUG.
 - b. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu:

Sosialisasi peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi, dengan output kegiatan jumlah organisasi wanita yang dilaksanakan peningkatan kapasitas yaitu DWP Kabupaten dan GOW target 200 orang, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 443.979.371- Adapun realisasi anggaran s/d triwulan III sebesar Rp. 261.461.282,-tingkat capaian keuangan 43,34% dan fisik 43,34%.

- c. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu:
Advokasi Kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan Perempuan target 5 (Lima) Lembaga, pagu anggaran sebesar Rp. 19.999.770,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp.16.549.770 ,- 82,75% dan fisik 82,75%.

- II. Sasaran Kinerja meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak capaian indikatornya yaitu Ratio Kekerasan terhadap perempuan dengan target tahun 2024 sebanyak 12 Kasus dan kondisi triwulan III tahun 2024 sebesar 2,42 % dari target capaian ini diperoleh dengan penghitungan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dibagi jumlah penduduk perempuan x 100.000, atau $4/153.570 \times 100.000 = 2,42\%$ Artinya sampai dengan kondisi triwulan III jumlah korban kekerasan terhadap perempuan sebanyak 4 kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak.

Capaian realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan program pada kondisi triwulan III Tahun 2024 dalam pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Perlindungan Perempuan dengan kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu:
Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target Tahun 2024 sebanyak 30 kasus dan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 jumlah kasus sebanyak 4 kasus atau tingkat capaian sebesar 2,42%. Pagu anggaran sebesar Rp. 19.999.770,- dan realisasi s/d triwulan III sebesar Rp. 16.549.770- tingkat capaian keuangan 82,75%. Fisik 82,75%

- III. Sasaran kinerja meningkatnya kualitas keluarga dengan indikator Angka Perceraian, target tahun 2024 sebesar 1,5 dan realisasi pada kondisi triwulan III tahun 2024 ini angka perceraian sebesar 1,26%. Angka ini diperoleh dengan

menghitung jumlah kasus perceraian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada sebanyak 432 kasus perceraian (Angka perceraian kasar) dari jumlah penduduk tahun 2024 adalah 321.472 dikali 1000 maka angka perceraian sebesar 1,26. Angka ini dapat dikatakan masih tinggi karena dilihat dari jumlah kasus perceraian masih tinggi. Faktor penyebab tingginya jumlah perceraian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat didominasi karena faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkarannya serta salah satu pihak meninggalkan. Rentannya ketahanan keluarga sebagai dampak sulitnya ekonomi, pengurangan penghasilan, pembelajaran serta daring yang menyebabkan kejenuhan pada anak-anak serta para orang tua, terutama seorang ibu yang semula hanya bertugas sebagai terkait urusan rumah tangga mendadak harus berperan seorang guru dan kebersamaan di rumah yang terlalu lama juga dapat menimbulkan stress bagi semua anggota keluarga. Selain itu juga perkawinan usia muda menjadi penyebab terjadinya perceraian karena ketidaksiapan pasangan dalam membina Rumah Tangga. Tugas dan fungsi dari bidang pemberdayaan perempuan yaitu pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesenjangan Gender dan Hak Anak, karena keterbatasan anggaran maka tahun 2024 kegiatan dimaksud tidak ada dilaksanakan.

- IV. Sasaran kinerja meningkatnya Status Kabupaten Layak Anak dengan indikator Skor capaian Kabupaten Layak Anak, Tahun 2021 target Skor 599 dan realisasi pada kondisi triwulan III telah mencapai Skor 599, maka tingkat capaiannya 100% dan telah mencapai Kabupaten Layak Anak dengan kategori Pratama dengan skor 599. Tercapainya target ini karena Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mempunyai regulasi mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perda Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) serta Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang pencegahan dan penanganan perkawinan usia anak kemudian adanya keterlibatan Forum Anak Daerah dalam mengikuti Musrenbang Tingkat Kabupaten, tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga, tersedianya lembaga pengasuhan alternatif, semua Puskesmas sudah menjadi pelayanan ramah anak, serta 91,36% anak telah memiliki akta kelahiran, lebih dari 50% lebih Desa/Kelurahan telah memiliki Forum Anak dan PATBM yaitu Perlindungan anak Berbasis Masyarakat, kemudian 11 sekolah sudah ramah anak (6 SD, 3 SLTP, 2 SMA), selain itu telah tersedianya lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga/LK3 dan Pusat Kreatifitas Anak.

Capaian realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan program pada kondisi triwulan III Tahun 2024 dalam pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota, sub kegiatan yaitu:
 - ❖ Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, output sub kegiatan jumlah pengembangan Media KIE pemenuhan hak anak target kinerja 20 KIE, dengan pagu anggaran Rp. 22.050.744,- realisasi s/d triwulan III sebesar Rp. 19.850.744,- atau tingkat capaian keuangan 90,02% dan fisik 89,93%.
 - b. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu:
 - ❖ Penyediaan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 22.905.925,- Output sub kegiatan jumlah penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina target 10 sekolah. Adapun realisasi anggaran s/d triwulan III sebesar Rp. 4.500.000,-atau tingkat capaian keuangan 19,65% dan fisik 19,64%
 - ❖ Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pagu anggaran Rp. 7.909.600,- realisasi triwulan III belum ada.
- V. Sasaran kinerja terkendalinya kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaatan bonus demografi dapat dilihat dari indikator kinerja Angka Total Kelahiran/TFR (Total Fertility Rate) per WUS 15-49 Tahun dengan target Tahun 2024 sebesar 2,55% dan Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) tahun per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) dengan target tahun 2021 sebesar 69%. Untuk capaian/realisasi kondisi triwulan III Tahun 2021 belum dapat dihitung karena karena penghitungannya adalah berdasarkan hasil pendataan SIGA yang dilakukan pada akhir tahun pelaksanaan.
- VI. Sasaran kinerja meningkatnya ketahanan, kesejahteraan keluarga dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dengan indikator kinerja yaitu: Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) dengan target tahun 2021 sebesar 58,2%, Angka Pemakaian Cobtrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15-49

tahun dengan target sebesar 65,6% dan Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terpenuhi/ Unmet need) dengan target 27,05%. Untuk capaian/ realisasi kondisi triwulan III tahun 2021 belum dapat dihitung karena karena penghitungannya adalah berdasarkan hasil pendataan SIGA yang dilakukan pada akhir tahun pelaksanaan serta menunggu penghitungan secara nasional.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut diatas didukung dengan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Capaian realisasi keuangan dan fisik pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan program pada kondisi triwulan III Tahun 2024 dalam pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk dengan kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, sub kegiatan yaitu:
 - ❖ Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jejaring SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal, pagu anggaran Rp.29.999.990,- realisasi Rp.23.999.900,- atau tingkat capaian keuangan 80,00 %. dan fisik 80,00%.
2. Program Keluarga Berencana (KB), kegiatan yang dilaksanakan:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, sub kegiatan yaitu:
 - ❖ Advokasi Program KKBPK Kepada Stake Holder an Mitra Kerja dengan pagu anggaran Rp. 4.374.926,- Adapun realisasi anggaran sampai triwulan III realisasi keuangan Rp. 4.374.926,- atau tingkat capaian 100% dan fisik 100%.
 - ❖ Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal dengan Pagu Anggaran 24.999.750,-Adapun realisasi anggaran sampai triwulan III realisasi keuangan Rp. 24.600.000,- atau tingkat capaian 98,40% dan fisik 98,40 %.
 - ❖ Program KIE dan Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang dengan Pagu Anggaran 83.185.124,- Adapun realisasi anggaran sampai triwulan III realisasi keuangan Rp. 10.450.000,- atau tingkat capaian 12,56% dan fisik 12,56 %.
 - b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), sub kegiatan yaitu:

- ❖ Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB), out sub kegiatan jumlah pelaksanaan monitoring evaluasi dan kebutuhan PLKB, Non PNS untuk penguatan kapasitas program KKBPK, target satu kali monev dan 35 PLKB Non PNS dengan pagu anggaran sebesar Rp. 262.827.670,- Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 189.000.000,- tingkat capaian keuangan 71,91% dan fisik 71,91%.
 - ❖ Peningkatan penyediaan informasi data mikro program KKBPK di setiap Desa/Kelurahan Kewenangan Kabupaten/Kota pagu anggaran Rp. 25.567.200,- realisasi Rp. 25.567.200,- atau tingkat capaian 100% dan fisik 100%.
- c. Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB, dengan sub kegiatan:
- ❖ Penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB, pagu anggaran sebesar Rp. 13.446.741,- realisasi keuangan 13.446.741,-, dengan tingkat capaian fisik dan keuangan 100%
- d. Kegiatan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan yaitu:
- ❖ Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya, output sub kegiatan jumlah akseptor KB yang mendapat pembinaan dan pelayanan KB target 600 akseptor KB, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 34.390.500,- realisasi sebesar Rp. 13.470.500,- tingkat capaian keuangan 53,71% dan fisik 53,71%.
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), kegiatan yang dilaksanakan adalah:
- a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sub kegiatan yaitu:
- ❖ Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS), output kegiatan jumlah kelompok kegiatan (Poktan) yang dibentuk/direvitalisasi serta Kader yang dibina target 30 Kader dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 28.749.749,- triwulan III realisasi sebesar Rp. 22.749.749,- atau tingkat capaian keuangan 79,13% dan fisik 79,13%.

Permasalahan dan Solusi :

A. Permasalahan:

Dalam pencapaian Indikator Kinerja sasaran yang didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan III Tahun 2024 permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan program dan kegiatan masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dan SDM secara kuantitas maupun kualitas.
2. Minimnya pagu anggaran program sehingga tidak efektif dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

B. Solusi :

Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas maka solusi yang dilaksanakan antara lain :

- 1 Dengan sarana dan prasarana serta SDM yang ada tetap menjalankan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan seminim mungkin dan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 2 Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan pada DPA Perangkat Daerah, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak terlepas dari pelayanan terhadap masyarakat maupun perangkat daerah. Bidang urusan yang dilaksanakan yaitu urusan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, dan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Isu-isu strategis dalam kaitannya dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana melalui program yang dilaksanakan secara komprehensif, haruslah menjadi komitmen dari seluruh jajaran aparatur yang mengemban tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan, bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dan bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, karena isu strategis adalah merupakan kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, bersifat kelembagaan dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang.

Secara garis besar isu-isu penting/strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan disektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial.
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat
3. Angka perceraian yang meningkat setiap tahunnya.
4. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
5. Pernikahan usia anak masih relative tinggi
6. Angka Kelahiran Total (TFR) masih tinggi di atas angka Provinsi.
7. Kebutuhan ber-KB yang belum terlayani (unmetneed).
8. Prevalensi stunting relative masih tinggi.
9. Bonus Demografi, proporsi penduduk usia produktif 15-64 tahun meningkat
10. Masih adanya angka kelahiran usia remaja 15-19 tahun (Age Spesifik Fertility Rate/ASFR dan Kehamilan yang tidak diinginkan.
11. Perubahan struktur keluarga dan mobilitas anggota keluarga serta terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan keluarga dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan anak hingga kebahagiaan keluarga.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2026

Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2026 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) pada tahun 2026 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2026 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisa kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Telaahan terhadap Rancangan Akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD meliputi kegiatan prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran kegiatan serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini Dinas. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Rancangan Akhir Awal Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 berpedoman pada renstra Tahun 2021-2026.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat didiskusikan dalam pembahasan Forum Perangkat Daerah Lintas Sektor Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pembahasan yang dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Rancangan Akhir Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang di Kecamatan. Pada Forum Perangkat Daerah ada usulan program atau kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari kelompok masyarakat dan Perangkat Daerah Kecamatan. Akan tetapi usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, tentang telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Provinsi, maka kebijakan nasional dan Provinsi dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

- A. Terkait dengan pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian dan Provinsi Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam hal :
1. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan
Sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - b. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender
Capaian sasaran ini di ukur dengan indikator kinerja utama: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
 2. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan
Sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut :
 - a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan ratio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
 3. Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan di bagi jumlah perempuan di atas 18 tahun
 - a. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: persentase Kabupaten/Kota yang memberikan layanan komprehensif sesuai standar kepada seluruh perempuan (100%) korban kekerasan.
 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergisitas antar lembaga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran yang ingin di capai adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya partisipasi dan sinergisitas lembaga profesi dan dunia usaha, media dan organisasi agama dan masyarakat serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan dan perlindungan anak

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase Partipasipasi Lembaga masyarakat

5. Meningkatnya perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak anak
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Tingkat Kabupaten/Kota Layak Anak

- b. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar.

- B. Terkait dengan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal pelayanan yaitu:

Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS (15-49 tahun)
2. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR)
3. Meningkatnya indeks pembangunan keluarga

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama Persentase pemakaian kontrasepsi.

1. Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- a. Menurunnya kebutuhan ber- Kb yang tidak terpenuhi (unmet need)
- b. Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)
- c. Meningkatnya dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama, Persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi dan persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)

2. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- a. Menurunnya Angka Kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (ASFR 12-19 tahun)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator Kinerja utama yaitu Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 (ASFR 15-19 tahun)

3. Penguatan tata kelola, penelitian, dan pengembangan bidang keluarga Berencana untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan efektifitas du Kependudukan dan KB

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- a. Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama, Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat merujuk pada program dan kegiatan yang ditetapkan pada Rencana Strategis tahun 2021-2026, dengan target kinerja untuk Tahun 2026. Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah **”Meningkatkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, status Kabupaten Layak Anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi”**.

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan jangka menengah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesetaraan gender
2. Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak
3. Meningkatnya kualitas keluarga
4. Meningkatnya Status Kabupaten Layak Anak (KLA)
5. Terkendalinya kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaatan bonus demografi
6. Meningkatnya ketahanan, kesejahteraan keluarga dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB/KR)

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sasaran Perangkat daerah disajikan pada **Tabel 3.1** berikut:

TABEL 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORM PERHITUNGAN	KONDISI AWAL TAHUN (2020)	TARGET TAHUN 2024	SATUAN	SUMBER DATA	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
1.	Terselenggaranya Tata Kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	1. Nilai AKIP Perangkat Daerah	Penilaian Inspektorat	67,48	70,51	%	LHE AKIP Inspektorat	Non IKU
				2. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	(total dari nilai persepsi Perunsur dibagi total unsur terisi) dikali nilai penimbang	83,81	86,20	%	Hasil Survey	
				3. Tingkat tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	jumlah temuan dibagi jumlah yang ditindaklanjuti dikali 100%	100%	100%	%	LHP Inspektorat	
2.	Meningkan kesetaraan gender, perlindungan terhadap perempuan dan anak, status kabupaten layak anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan pembangunan keluarga dan kesehatan reproduksi	Meningkatkan kesetaraan gender di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2 Meningkatnya Kesetaraan Gender	4. Indek Pembangunan Gender (IPG)	IPM Perempuan dibagi IPM Laki-laki dikali 100%	85,68	89,00	Indeks	Penghitungan Kementerian PPPA dan Provinsi	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
				5. Indek Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks keterwakilan diparlemen ditambah Indeks pengambil keputusan ditambah Indeks distribusi pendapatan dibagi 3 (tiga) dikali 100%	68,31	70,00	Indeks		
		Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak	3 Meningkatnya perlindungan perempuan	6. Rasio kekerasan terhadap perempuan	Jlh Perempuan korban kekerasan dibagi jlh.penduduk perempuan dikali 100.000	18	6	Rasio	Laporan Data Simponi di DP3AP2KB	
			4 Meningkatnya kualitas Keluarga	7. Angka perceraian	Jlh. Perceraian dibagi jumlah penduduk dikali 1000	1,69	0,75	Angka	Pengadilan Agama & DP3AP2KB	
			5 Meningkatnya Status Kabupaten Layak Anak	8. Skor Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kategori Penilaian: Pratama= 500-599 Madya = 600-699 Nindya= 700-799 Utama= 800-899 KLA = 900-1000	500	Nindya	Skor	Data Laporan capaian indikator penilaian KLA dari OPD terkait	
		Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk tumbuh seimbang	6 Terkendalnya kuantitas dan kualitas penduduk serta pemanfaatan bonus demografi	9. Angka Total Kelahiran/ (Total Fertility Rate/TFR) per WUS 15-49 tahun	TFR= $\frac{5}{7} = 1$ ASFR i ASFR=Jlh kelahiran per 1000 perempuan kelompok umur (15-19th) s/d 45-49th	2,59	2,4	Angka	Data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) DP3AP2KB	
		Meningkatkan pembangunan keluarga	7 Meningkatnya Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR)	10 Indek Pembangunan Keluarga (Ibangga)	Indeks ketentraman ditambah indeks kemandirian ditambah indeks kebahagiaan dibagi 3 (tiga) dikali 100%	66,34	64,56	%	Penghitungan BKKBN Provinsi	
				11 Angka Kelahiran Remaja/ ASFR 15-19 (kelompok umur per 1.000 pada kelompok usia)	Jlh.kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 th dibagi jlh penduduk perempuan kelompok umur 15-19th pada pertengahan tahun yg sama dikali 100%	69	66	Angka	Data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) DP3AP2KB	
				10 Angka Pemakaian Kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	Jlh peserta KB Aktif dibagi jlh Pasangan Usia Subur(PUS) dikali 100%	64,4	68,3	%	Data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) DP3AP2KB	
				12 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani dibagi jumlah PUS dikali 100%	9,19	18,05	%	Data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) DP3AP2KB	

3.3. Program dan Kegiatan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dan diperlukan pembiayaan pada tahun 2026 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, direncanakan terdiri dari 10 program 28 kegiatan dan 69 sub kegiatan yang dibiayai oleh dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebesar Rp.11.551.550,- Adapun rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 serta Prakiraan maju Tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seperti yang tersaji pada tabel TC.33 berikut ini:

TABEL T-C. 33
RUMUSAN RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

Berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Kec. Tkl Ilir	73,00				73,00	
		Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		88,50				88,50	
		Tingkat tindak lanjut temuan hasil Pemeriksaan		100%				100%	
2 08 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Kec. Tkl Ilir	100%	7.206.902.893			100%	7.206.902.893
2 08 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan PD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kec. Tkl Ilir	14 Dokumen	176.600.000			14 Dokumen	176.600.000
2 08 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tkl Ilir	6 Dokumen	65.500.000	APBD		6 Dokumen	65.500.000
2 08 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tkl Ilir	14 Laporan	43.000.000	APBD		14 Laporan	43.000.000
2 08 1 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tkl Ilir	4 Laporan	68.100.000	APBD		4 Laporan	68.100.000
2 08 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD	Kec. Tkl Ilir	1 Laporan	4.316.656.368			1 Laporan	4.316.656.368
2 08 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tkl Ilir	31 Orang/Bulan	4.038.296.368	APBD		31 Orang/Bulan	4.038.296.368
2 08 01 2.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tkl Ilir	15 Dokumen	242.360.000	APBD		15 Dokumen	242.360.000
2 08 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Tkl Ilir	5 Laporan	36.000.000	APBD		5 Laporan	36.000.000
2 08 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kartu Inventaris Barang Milik Daerah	Kec. Tkl Ilir	5 Kartu Inventaris	19.500.000			5 Kartu Inventaris	19.500.000
2 08 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Tkl Ilir	6 Laporan	19.500.000	APBD		6 Laporan	19.500.000
2 08 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai	Kec. Tkl Ilir	100 Persen	67.500.000			100 Persen	67.500.000
2 08 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Tkl Ilir	77 Paket	42.500.000	APBD		77 Paket	42.500.000
2 08 01 2.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Tkl Ilir	3 Dokumen	25.000.000	APBD		3 Dokumen	25.000.000
2 08 01 2.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Tkl Ilir	5 Orang	-	APBD		5 Orang	-
2 08 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Kec. Tkl Ilir	100 %	598.296.525			100 %	598.296.525
2 08 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Tkl. Ilir	12 Paket	14.000.000	APBD		12 Paket	14.000.000
2 08 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Tkl. Ilir	12 Paket	94.924.000	APBD		12 Paket	94.924.000
2 08 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Tkl. Ilir	284 Paket	27.200.000	APBD		284 Paket	27.200.000
2 08 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Tkl. Ilir	166 Paket	60.952.525	APBD		166 Paket	60.952.525
2 08 01 2.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kec. Tkl. Ilir	1 Dokumen	4.320.000	APBD		1 Dokumen	4.320.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 08 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Tkl. Ilir	2 Laporan	396.900.000	APBD		2 Laporan	396.900.000
2 08 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan OPD	Kec.Tkl. Ilir	33 Unit	1.299.872.000			33 Unit	1.299.872.000
2 08 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec.Tkl. Ilir	9 Unit	797.786.000	APBD		9 Unit	797.786.000
2 08 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec.Tkl. Ilir	4 Unit	159.536.000	APBD		4 Unit	159.536.000
2 08 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec.Tkl. Ilir	20 Unit	157.550.000	APBD		20 Unit	157.550.000
2 08 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec.Tkl. Ilir	8 Unit	85.000.000	APBD		8 Unit	85.000.000
2 08 01 2.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec.Tkl. Ilir	0	-	APBD		0	-
2 08 01 2.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec.Tkl. Ilir	10 Unit	100.000.000	APBD		10 Unit	100.000.000
2 08 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec.Tkl. Ilir	100 Persen	404.830.000			100 Persen	404.830.000
2 08 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Tkl. Ilir	1 Laporan	3.250.000	APBD		1 Laporan	3.250.000
2 08 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Tkl. Ilir	1 Laporan	62.100.000	APBD		1 Laporan	62.100.000
2 08 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Tkl. Ilir	1 Laporan	339.480.000	APBD		1 Laporan	339.480.000
2 08 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec.Tkl. Ilir	48 unit	323.648.000			48 unit	323.648.000
2 08 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec.Tkl. Ilir	14 Unit	58.654.000	APBD		14 Unit	58.654.000
2 08 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec.Tkl. Ilir	16 Unit	89.994.000	APBD		16 Unit	89.994.000
2 08 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec.Tkl. Ilir	17 Unit	75.000.000	APBD		17 Unit	75.000.000
2 08 01 2.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Tkl. Ilir	1 Unit	100.000.000	APBD		1 Unit	100.000.000
2 08 02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD dan Desa melaksanakan PPRG		10%	659.649.607			10%	659.649.607
2 08 02 201	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Kelembagaan PUG</i>	<i>Tanjab Barat</i>	<i>15 Lembaga PUG</i>	<i>130.000.000</i>			<i>15 Lembaga PUG</i>	<i>130.000.000</i>
2 08 02 201 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan	Tanjab Barat	15 Dokumen	20.000.000	APBD		15 Dokumen	20.000.000
2 08 02 201 0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Tanjab Barat	15 Orang	40.000.000	APBD		15 Orang	40.000.000
2 08 02 201 0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Tanjab Barat	30 Orang	70.000.000	APBD		30 Orang	70.000.000
2 08 02 202	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang berperan/partisipasi di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi		200 orang	479.649.607			200 orang	479.649.607

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 08 02 202 0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tanjab Barat	4 Dokumen	479.649.607	APBD		4 Dokumen	479.649.607
2 08 02 203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Tanjab Barat	5 Lembaga	50.000.000			5 Lembaga	50.000.000
2 08 02 203 0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	Tanjab Barat	5 Lembaga	50.000.000	APBD		5 Lembaga	50.000.000
2 08 03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan penanganan pengaduan kekerasan		100%	570.000.000			100%	570.000.000
2 08 03 201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Tanjab Barat	2 kali	150.000.000			2 kali	150.000.000
2 08 03 201 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tanjab Barat	2 Dokumen	150.000.000	APBD		2 Dokumen	150.000.000
2 08 03 202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan	Tanjab Barat	1 Kasus	270.000.000			1 Kasus	270.000.000
2 08 03 202 0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Tanjab Barat	30 Orang	70.000.000	APBD		30 Orang	70.000.000
2 08 03 202 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tanjab Barat	8 Layanan	200.000.000	APBD		8 Layanan	200.000.000
2 08 03 203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit layanan pengaduan kekerasan	Tanjab Barat	24 unit layanan	150.000.000			24 unit layanan	150.000.000
2 08 03 203 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	Tanjab Barat	30 orang	100.000.000	APBD		30 orang	100.000.000
2 08 03 203 0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tanjab Barat	5 Dokumen	50.000.000	APBD		5 Dokumen	50.000.000
2 08 04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga		2%	130.000.000			2%	130.000.000
2 08 04 201	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga melalui KG	Tanjab Barat	200 Keluarga	40.000.000			200 Keluarga	40.000.000
2 08 04 201 0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Tanjab Barat	4 Dokumen	40.000.000	APBD		4 Dokumen	40.000.000
2 08 04 202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pusat pelayanan keluarga	Tanjab Barat	5 Pusat Layanan Keluarga	90.000.000			5 Pusat Layanan Keluarga	90.000.000
2 08 04 202 0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	Tanjab Barat	5 Lembaga	20.000.000	APBD		5 Lembaga	20.000.000
2 08 04 202 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Tanjab Barat	30 orang	70.000.000	APBD		30 orang	70.000.000
2 08 05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD memiliki data pilah berdasarkan jenis kelamin		100%	20.000.000			100%	20.000.000
2 8 5 201	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Profile Gender Kabupaten Tanjung Jabung	Tanjab Barat	1 Profile Gender	20.000.000			1 Profile Gender	20.000.000
2 8 5 201 0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Tanjab Barat	44 Dokumen	20.000.000	APBD		44 Dokumen	20.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 08 06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan hak anak yang terpenuhi		54%	460.000.000			54%	460.000.000
2 08 06 201	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha yang dibina	Tanjab Barat	75 Lembaga PHA	260.000.000			75 Lembaga PHA	260.000.000
2 08 06 201 0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non	Tanjab Barat	45 Organisasi	130.000.000	APBD		45 Organisasi	130.000.000
2 08 06 201 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tanjab Barat	5 Dokumen	130.000.000	APBD		5 Dokumen	130.000.000
2 08 06 202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dilakukan penguatan dan pengembangan	Tanjab Barat	20 Sekolah	200.000.000			20 Sekolah	200.000.000
2 08 06 202 0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tanjab Barat	6000 Orang	50.000.000	APBD		6000 Orang	50.000.000
2 08 06 202 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tanjab Barat	20 Dokumen	50.000.000	APBD		20 Dokumen	50.000.000
2 08 06 202 0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tanjab Barat	1 Dokumen	50.000.000	APBD		1 Dokumen	50.000.000
2 08 06 202 0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan	Tanjab Barat	3 Dokumen	50.000.000	APBD		3 Dokumen	50.000.000
2 08 07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak yang memperoleh layanan perlindungan khusus		27,30%	360.000.000			27,30%	360.000.000
2 08 07 201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	Tanjab Barat	2 upaya	130.000.000			2 upaya	130.000.000
2 08 07 201 0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Tanjab Barat	10 Orang	70.000.000	APBD		10 Orang	70.000.000
2 08 07 201 0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	Tanjab Barat	15 Dokumen	60.000.000	APBD		15 Dokumen	60.000.000
2 08 07 202	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan	Tanjab Barat	30 Orang	60.000.000			30 Orang	60.000.000
2 08 07 202 0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Tanjab Barat	30 Orang	40.000.000	APBD		30 Orang	40.000.000
2 08 07 202 0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Tanjab Barat	30 Orang	20.000.000	APBD		30 Orang	20.000.000
2 8 7 203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Tanjab Barat	21 Unit layanan PA	170.000.000			21 Unit layanan PA	170.000.000
2 8 7 203 0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Tanjab Barat	2 Kegiatan	120.000.000	APBD		2 Kegiatan	120.000.000
2 8 7 203 0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Tanjab Barat	21 Orang	50.000.000	APBD		21 Orang	50.000.000
2 14 02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		1,9	367.998.000			1,9	367.998.000
		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Grand Design Pengendalian Penduduk		100%				100%	
2 14 02 201	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Perda/ Perbup) yang mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	Tanjab Barat	3 kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDDPK	165.000.000			3 kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDDPK	165.000.000
2 14 02 201 0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tanjab Barat	-	-	APBD		-	-

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	14	02	201	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal	Tanjab Barat	23 Satuan Pendidikan	165.000.000	APBD		23 Satuan Pendidikan	165.000.000
2	14	02	202		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah profil kependudukan yang update tingkat kabupaten	Tanjab Barat	3 Profil KKBPB	202.998.000			3 Profil KKBPB	202.998.000
2	14	02	202	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Tanjab Barat	3 Dokumen	75.998.000	APBD		3 Dokumen	75.998.000
2	14	02	202	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Tanjab Barat	13 Dokumen	125.000.000	APBD		13 Dokumen	125.000.000
2	14	02	202	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Tanjab Barat	1 Laporan	1.000.000	APBD		1 Laporan	1.000.000
2	14	02	202	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tanjab Barat	13 Dokumen	1.000.000	APBD		13 Dokumen	1.000.000
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase tingkat ketidakberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi (Drop Out KB)		19,58%	1.186.000.000			19,58%	1.186.000.000
2	14	03	201		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Frekuensi pelaksanaan advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB	Tanjab Barat	21 Kali	188.000.000			21 Kali	188.000.000
2	14	03	201	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tanjab Barat	1 Laporan	1.000.000	APBD		1 Laporan	1.000.000
2	14	03	201	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Tanjab Barat	1 Laporan	1.000.000	APBD		1 Laporan	1.000.000
2	14	03	201	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tanjab Barat	1 Dokumen	25.000.000	APBD		1 Dokumen	25.000.000
2	14	03	201	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Tanjab Barat	1 Dokumen	1.000.000	APBD		1 Dokumen	1.000.000
2	14	03	201	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Tanjab Barat	21 Organisasi	160.000.000	APBD		21 Organisasi	160.000.000
2	14	3	202		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan dalam penyuluhan dan pergerakan program KKBPB	Tanjab Barat	100%	744.000.000			100%	744.000.000
2	14	3	202	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tanjab Barat	268 orang	200.000.000	APBD		268 orang	200.000.000
2	14	3	202	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan	Tanjab Barat	12 Laporan	544.000.000	APBD		12 Laporan	544.000.000
2	14	3	203		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Tanjab Barat	100%	153.000.000			100%	153.000.000
2	14	03	203	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tanjab Barat	2218 Orang	1.000.000	APBD		2218 Orang	1.000.000
2	14	3	203	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tanjab Barat	1 Dokumen	1.000.000	APBD		1 Dokumen	1.000.000

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 14 3 203 0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tanjab Barat	30 Unit	1.000.000	APBD		30 Unit	1.000.000
2 14 3 203 0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Taniab Barat	12 Laporan	75.000.000	APBD		12 Laporan	75.000.000
2 14 3 203 0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Tanjab Barat	620 Orang	75.000.000	APBD		620 Orang	75.000.000
2 14 03 204	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase omas/mitra kerja yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Tanjab Barat	100%	101.000.000			100%	101.000.000
2 14 03 204 0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Tanjab Barat	50 Organisasi	50.000.000	APBD		50 Organisasi	50.000.000
2 14 03 204 0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Tanjab Barat	21 Dokumen	50.000.000	APBD		21 Dokumen	50.000.000
2 14 03 204 0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tanjab Barat	21 Kampung	1.000.000	APBD		21 Kampung	1.000.000
2 14 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota Poktan yang ber-KB (BKB, BKR, BKL, UPPKS)		100%	591.000.000			100%	591.000.000
2 14 04 201	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) yang mendapatkan pembinaan KKS	Tanjab Barat	100 Orang	591.000.000			100 Orang	591.000.000
2 14 04 201 0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tanjab Barat	1 Laporan	180.000.000	APBD		1 Laporan	180.000.000
2 14 04 201 0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	Taniab Barat	20 Unit	150.000.000	APBD		20 Unit	150.000.000
2 14 04 201 0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Tanjab Barat	2 Orang	60.000.000	APBD		2 Orang	60.000.000
2 14 04 201 0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Tanjab Barat	672 Orang	1.000.000	APBD		672 Orang	1.000.000
2 14 04 201 0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Tanjab Barat	1 Kelompok	200.000.000	APBD		1 Kelompok	200.000.000
2 14 04 201 0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Tanjab Barat	-	-	APBD		-	-
					11.551.550.500				11.551.550.500

BAB IV

RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah menggambarkan rencana program, sasaran dan kegiatan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 adalah merupakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Renstra Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan tersebut adalah untuk menguraikan target kinerja yang hendak dicapai tahun 2026. Kemudian penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 ini dibuat dengan telah disusunnya Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memantau perkembangan pelaksanaan program, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dari permasalahan serta sebagai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan yang kemudian akan dijabarkan kepada program/kegiatan prioritas dalam hal pendanaannya. Pencapaian target kinerja program tidak hanya didukung dengan pendanaan dari APBD Kabupaten saja, namun pada tahun lalu juga didukung dengan sumber pendanaannya bersumber dari APBN/DAK yaitu untuk mendukung program dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jumlah program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat pagu indikatif anggaran APBD Tahun 2026 direncanakan sebesar Rp. 11.550.551,-

Adapun Rencana Kerja (RENJA) dan pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 tertuang pada tabel 4.1 berikut ini:

TABEL T-C. 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2026
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			SUMBER DANA
							LOKASI	Tahun- 6 (2026)		
						Target		Rp.		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kec. Tkl Ilir	88,50		
						Tingkat tindak lanjut temuan hasil Pemeriksaan		100%		
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Kec. Tkl Ilir	100%	7.206.902.893	APBD
2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan PD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kec. Tkl Ilir	14 Dokumen	176.600.000	APBD
2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Tkl Ilir	6 Dokumen	65.500.000	APBD
2	08	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tkl Ilir	14 Laporan	43.000.000	APBD
2	08	1	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Tkl Ilir	4 Laporan	68.100.000	APBD
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD	Kec. Tkl Ilir	1 Laporan	4.316.656.368	APBD
2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tkl Ilir	31	4.038.296.368	APBD
2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tkl Ilir	15 Dokumen	242.360.000	APBD
2	08	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. Tkl Ilir	5 Laporan	36.000.000	APBD
2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kartu Inventaris Barang Milik Daerah	Kec. Tkl Ilir	5 Katu Inventaris	19.500.000	APBD
2	08	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Tkl Ilir	6 Laporan	19.500.000	APBD
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai	Kec. Tkl Ilir	100 Persen	67.500.000	APBD
2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Tkl Ilir	77 Paket	42.500.000	APBD
2	08	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kec. Tkl Ilir	3 Dokumen	25.000.000	APBD
2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Tkl Ilir	5 Orang	-	APBD
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	Kec. Tkl Ilir	100 %	598.296.525	APBD
2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec.Tkl. Ilir	12 Paket	14.000.000	APBD
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Tkl. Ilir	12 Paket	94.924.000	APBD
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec.Tkl. Ilir	284 Paket	27.200.000	APBD
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec.Tkl. Ilir	166 Paket	60.952.525	APBD
2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Disediakan	Kec.Tkl. Ilir	1 Dokumen	4.320.000	APBD

Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			SUMBER DANA
								LOKASI	Tahun- 6 (2026)		
									Target	Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Tkl. Ilir	2 Laporan	396.900.000		
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan OPD	Kec.Tkl. Ilir	33 Unit	1.299.872.000		
2	08	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kec.Tkl. Ilir	9 Unit	797.786.000		
2	08	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec.Tkl. Ilir	4 Unit	159.536.000		
2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec.Tkl. Ilir	20 Unit	157.550.000		
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec.Tkl. Ilir	8 Unit	85.000.000		
2	08	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec.Tkl. Ilir	0	-		
2	08	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kec.Tkl. Ilir	10 Unit	100.000.000		
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec.Tkl. Ilir	100 Persen	404.830.000		
2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.Tkl. Ilir	1 Laporan	3.250.000		
2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Tkl. Ilir	1 Laporan	62.100.000		
2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Tkl. Ilir	1 Laporan	339.480.000		
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec.Tkl. Ilir	48 unit	323.648.000		
2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec.Tkl. Ilir	14 Unit	58.654.000		
2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec.Tkl. Ilir	16 Unit	89.994.000		
2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		17 Unit	75.000.000		
2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	100.000.000		
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase OPD dan Desa melaksanakan PPRG		10%	659.649.607		
2	08	02	201		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan PUG		15 Lembaga PUG	130.000.000		
2	08	02	201	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Dokumen	20.000.000		
2	08	02	201	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Orang	40.000.000		
2	08	02	201	0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota		30 Orang	70.000.000		
2	08	02	202		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang berperan/partisipasi dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi		200 orang	479.649.607		

Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			SUMBER DANA
								LOKASI	Tahun- 6 (2026)		
									Target	Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	08	02	202	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		4 Dokumen	479.649.607		
2	08	02	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan		5 Lembaga Layanan PP	50.000.000		
2	08	02	203	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan		5 Lembaga	50.000.000		
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase layanan penanganan pengaduan kekerasan		100%	570.000.000		
2	08	03	201		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan		2 kali	150.000.000		
2	08	03	201	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Dokumen	150.000.000		
2	08	03	202		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan		1 Kasus	270.000.000		
2	08	03	202	0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan		30 Orang	70.000.000		
2	08	03	202	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		8 Layanan	200.000.000		
2	08	03	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit layanan pengaduan kekerasan		24 unit layanan	150.000.000		
2	08	03	203	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas		30 orang	100.000.000		
2	08	03	203	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Dokumen	50.000.000		
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga		2%	130.000.000		
2	08	04	201		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga memperoleh edukasi kualitas keluarga melalui KG		200 Keluarga	40.000.000		
2	08	04	201	0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesenjangan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia		4 Dokumen	40.000.000		
2	08	04	202		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pusat pelayanan keluarga		5 Pusat Layanan Keluarga	90.000.000		
2	08	04	202	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan		5 Lembaga	20.000.000		
2	08	04	202	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		30 orang	70.000.000		
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD memiliki data pilah berdasarkan jenis kelamin		100%	20.000.000		
2	8	5	201		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Profile Gender Kabupaten Tanjung Jabung		1 Profile Gender	20.000.000		
2	8	5	201	0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		44 Dokumen	20.000.000		

Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			SUMBER DANA
						Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	LOKASI	Tahun- 6 (2026)		
								Target	Rp.	
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	08	06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)		Persentase Pemenuhan hak anak yang terpenuhi	Tanjung Jabung Barat	54%	460.000.000	
2	08	06	201		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha yang dibina	Desa/kelurahan	75 Lembaga PHA	260.000.000	
2	08	06	201	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia	Desa/kelurahan	45 Organisasi	130.000.000	
2	08	06	201	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab/pro/pusat	5 Dokumen	130.000.000	
2	08	06	202		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anakyang dilakukan penguatan dan pengembangan	Kecamatan	20 Sekolah	200.000.000	
2	08	06	202	0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kecamatan	6000 Orang	50.000.000	
2	08	06	202	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		20 Dokumen	50.000.000	
2	08	06	202	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen	50.000.000	
2	08	06	202	0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tanjung Jabung Barat	3 Dokumen	50.000.000	
2	08	07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		Persentase anak yang memperoleh layanan perlindungan khusus	Tanjung Jabung Barat	27,30%	360.000.000	
2	08	07	201		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	Tanjung Jabung Barat	2 upaya pencegahan	130.000.000	
2	08	07	201	0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Tanjung Jabung Barat	10 Orang	70.000.000	
2	08	07	201	0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota	Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota	Desa/kelurahan	15 Dokumen	60.000.000	
2	08	07	202		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapat layanan	Tanjung Jabung Barat	30 Orang	60.000.000	
2	08	07	202	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	Tanjung Jabung Barat	30 Orang	40.000.000	
2	08	07	202	0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	Tanjung Jabung Barat	30 Orang	20.000.000	
2	8	7	203		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	Tanjung Jabung Barat	21 Unit layanan PA	170.000.000	
2	8	7	203	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK	Tanjung Jabung Barat	2 Kegiatan	120.000.000	
2	8	7	203	0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	Desa/kelurahan	21 Orang	50.000.000	
2	14	02		Program Pengendalian Penduduk		Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Tanjab Barat	1,9	367.998.000	
						Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Grand Design Pengendalian Penduduk		100%		
2	14	02	201		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan (Perda/ Perbup) yang mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	Tanjab Barat	3 Kebijakan/ Perda/ Perbup/ SSK/ GDPK	165.000.000	
2	14	02	201	0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tanjab Barat	-	-	

Kode						Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			SUMBER DANA
								LOKASI	Tahun- 6 (2026)		
									Target	Rp.	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	14	02	201	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Tanjab Barat	23 Satuan Pendidikan	165.000.000		
2	14	02	202		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah profil kependudukan yang update tingkat kabupaten	Tanjab Barat	3 Profil KKBPK	202.998.000		
2	14	02	202	0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Tanjab Barat	3 Dokumen	75.998.000		
2	14	02	202	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Tanjab Barat	13 Dokumen	125.000.000		
2	14	02	202	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Tanjab Barat	1 Laporan	1.000.000		
2	14	02	202	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tanjab Barat	13 Dokumen	1.000.000		
2	14	03			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase tingkat ketidakberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi (Drop Out KB)	Tanjab Barat	19,58%	1.186.000.000		
2	14	03	201		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Frekuensi pelaksanaan advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB	Tanjab Barat	21 Kali	188.000.000		
2	14	03	201	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tanjab Barat	1 Laporan	1.000.000		
2	14	03	201	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Tanjab Barat	1 Laporan	1.000.000		
2	14	03	201	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tanjab Barat	1 Dokumen	25.000.000		
2	14	03	201	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Tanjab Barat	1 Dokumen	1.000.000		
2	14	03	201	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Tanjab Barat	21 Organisasi	160.000.000		
2	14	3	202		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan dalam penyuluhan dan penggerakan program KKBPK	Tanjab Barat	100%	744.000.000		
2	14	3	202	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Tanjab Barat	268 orang	200.000.000		
2	14	3	202	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana	Tanjab Barat	12 Laporan	544.000.000		
2	14	3	203		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penggunaan Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)		100%	153.000.000		
2	14	03	203	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tanjab Barat	2218 Orang	1.000.000		
2	14	3	203	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tanjab Barat	1 Dokumen	1.000.000		

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			SUMBER DANA
							LOKASI	Tahun- 6 (2026)		
								Target	Rp.	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	14	3	203	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tanjab Barat	30 Unit	1.000.000	
2	14	3	203	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Taniab Barat	12 Laporan	75.000.000	
2	14	3	203	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Tanjab Barat	620 Orang	75.000.000	
2	14	03	204		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase ormas/mitra kerja yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Tanjab Barat	100%	101.000.000	
2	14	03	204	0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Tanjab Barat	50 Organisasi	50.000.000	
2	14	03	204	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Tanjab Barat	21 Dokumen	50.000.000	
2	14	03	204	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Tanjab Barat	21 Kampung	1.000.000	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan anggota Poktan yang ber-KB (BKB, BKR, BKL, UPPKS)	Tanjab Barat	100%	591.000.000	
2	14	04	201		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) yang mendapatkan pembinaan KKS		100 Orang	591.000.000	
2	14	04	201	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tanjab Barat	1 Laporan	180.000.000	
2	14	04	201	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia		20 Unit	150.000.000	
2	14	04	201	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Tanjab Barat	2 Orang	60.000.000	
2	14	04	201	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Tanjab Barat	672 Orang	1.000.000	
2	14	04	201	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Tanjab Barat	1 Kelompok	200.000.000	
2	14	04	201	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Tanjab Barat	-	-	
									11.551.550.500	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 ini, merupakan tahap awal proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan dengan sinkronisasi pada Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. RKPD disusun mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (RENJA) ini akan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana setelah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang diharapkan.

Keberhasilan dari Rencana Kerja (RENJA) bukan hanya ditentukan dalam proses penyusunannya, akan tetapi banyak dipengaruhi implementasi penerapannya sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang optimal.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 ini dapat dijadikan bahan acuan seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) ini dibuat dengan penuh harapan dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur.

Kuala Tungkal, 09 Mei 2025
KEPALA DINAS

Drs. H. MUHAMMAD YUNUS
Pembina Utama Muda
NIP. 19680417 198810 1 001

